

ABSTRAK

Disertasi ini berfokus kepada Asas *Contrarius Actus* dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Asas *Contrarius Actus* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan administratif yang dibatalkan harus diikuti oleh tindakan administratif dari pejabat yang sama untuk mengembalikan keadaan ke status quo sebelum tindakan tersebut dilakukan. Disertasi ini bertujuan **Pertama** : menemukan gagasan filosofi pengaturan pelaksanaan eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, **Kedua** : menganalisa penerapan Asas *Contrarius Actus* dalam eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat mewujudkan kepastian Hukum, **Ketiga** : menemukan konsep putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan Eksekutorial dalam mewujudkan kepastian hukum. Disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis kasus-kasus PTUN yang telah dieksekusi menggunakan asas *Contrarius Actus*. Dalam disertasi ini, pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan Historis dan pendekatan konsep. Kesimpulannya dari disertasi ini yaitu : bahwa meskipun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami revisi untuk memperbaiki pengaturan eksekusi putusan PTUN, penerapan asas *Contrarius Actus* belum efektif karena eksekusi putusan sangat bergantung pada kesadaran dan kesediaan pejabat TUN. Ketidakjelasan dalam pengaturan sanksi, seperti uang paksa dan sanksi administratif, dualitas peraturan antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan menciptakan kebingungan dalam prosedur eksekusi putusan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Adapun rekomendasi yang ditawarkan yaitu : **Pertama** ; perlu ada revisi komprehensif terhadap Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) untuk mengatasi ketidakjelasan mengenai uang paksa. Revisi ini harus mencakup ketentuan rinci tentang besaran uang paksa yang proporsional dan mekanisme penetapannya untuk mencegah interpretasi yang berbeda dan memberikan panduan yang jelas bagi hakim. **Kedua** : Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan atau pedoman khusus yang mengatur tata cara penerapan uang paksa, termasuk prosedur penetapan, eksekusi, dan pengawasan. Untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan, antara pemerintah dan Mahkamah Agung diusulkan membentuk badan pengawas independen **Ketiga** : harmonisasi peraturan, diperlukan revisi undang-undang yang menyelaraskan ketentuan eksekusi putusan antara UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan, termasuk mekanisme eksekusi, besaran uang paksa, dan sanksi administratif yang konsisten. Mahkamah Agung dapat mendukung ini dengan menerbitkan pedoman pelaksanaan yang rinci diharapkan pelaksanaan putusan PTUN dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Asas *Contrarius Actus*, Eksekusi, Putusan PTUN, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Principle of Contrarius Actus in the Execution of Administrative Court Decisions to Achieve Legal Certainty

*This dissertation focuses on the principle of Contrarius Actus in the execution of decisions by the State Administrative Court (PTUN) in Indonesia, aiming to achieve legal certainty. The principle of Contrarius Actus is a legal principle stating that an annulled administrative act must be followed by an administrative act by the same official to restore the situation to the status quo before the act was taken. This dissertation aims to : **First** : Discover the philosophical foundations for the regulation of the execution of State Administrative Court decisions in Indonesia. **Second** : Analyze whether the application of the Contrarius Actus principle in the execution of State Administrative Court decisions can achieve legal certainty. **Third** : Develop a concept for State Administrative Court judges' decisions that possess executorial power to achieve legal certainty. This dissertation uses a normative juridical approach, analyzing various laws, court decisions, and relevant legal doctrines. Data were collected through literature studies and analysis of PTUN cases executed using the Contrarius Actus principle. The approaches used in this dissertation include statutory, case, historical, and conceptual approaches. The conclusions of this dissertation are that although the State Administrative Court Law has been revised to improve the regulation of the execution of PTUN decisions, the application of the Contrarius Actus principle has not been effective due to the execution's reliance on the awareness and willingness of administrative officials. Ambiguities in the sanction regulations, such as forced money and administrative sanctions, along with the duality of regulations between the PTUN Law and the Administrative Governance Law, create confusion in the execution procedures, ultimately reducing the effectiveness and legal certainty for justice seekers. The recommendations offered are as follows : **First** : A comprehensive revision of Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court (PTUN Law) is necessary to address the ambiguities regarding forced money. This revision should include detailed provisions on proportional forced money amounts and their mechanisms to prevent varying interpretations and provide clear guidelines for judges. **Second** : The Supreme Court should issue specific regulations or guidelines on the procedures for applying forced money, including determination, execution, and supervision procedures. To enhance coordination and supervision, it is proposed that the government and the Supreme Court establish an independent supervisory body. **Third** : Harmonizing regulations through a legislative revision that aligns the execution provisions between the PTUN Law and the Administrative Governance Law, including execution mechanisms, forced money amounts, and consistent administrative sanctions. The Supreme Court can support this by issuing detailed implementation guidelines to ensure that PTUN decisions are executed more effectively, thereby improving legal certainty and justice for the public.*

Keywords : *Contrarius Actus, Execution of Decisions, Administrative Court, Legal Certainty.*